

Luxas, “Tindak Pidana Illegal Logging”

<http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindakpidana-illegal-logging-undang.html>, diakses pada tanggal 28 April 2019, pukul 20.49 WIB.

Sipp.pn-batam.go.id, “Detail Perkara”

http://sipp.pn-batam.go.id/index.php/detil_perkara, Diakses pada 20 Desember 2019, Pukul 20.18 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Tentang “Kehutanan”, UU Nomor 41 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Tentang “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, UU Nomor 32 Tahun 2009.

Indonesia, Undang-Undang Tentang “Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan”, UU Nomor 18 Tahun 2013.

Indonesia, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Tentang “Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung”, Kepmen pertanian Nomor 837/Kpts/Um/11/1980.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Batam (Perda) Tentang “Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam”, Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI.

Hariato,dkk, *Pengawasan Pemerintah Bidang Kehutanan di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang Kota Batam* (Tj.Pinang:Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2018).

Isdian Anggraeny, *Akibat Hukum Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan di Kota Batam (Studi Kasus Penerbitanan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.463/Menhut-II/2013)*(Malang:Universitas Brawijaya. 2018).

Masdani, *Penerapan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) terhadap Kejahatan Kehutanan (illegal Logging)*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2005).